

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung

Muhammad Firman Nugraha^a, Maulina Fauziana^b, Jihan Nur Fauziyyah^c,
Muhammad Raffan Aziz^d, Endah Mustika Ramdani^e

a,b,c,d,e Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a21110207@poltek.stialanbandung.ac.id, ^b21110205@poltek.stialanbandung.ac.id,
^c21110203@poltek.stialanbandung.ac.id, ^d221110208@poltek.stialanbandung.ac.id,
^eendah.mustika@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Kelahiran dan perkembangan pesat dari perangkat komputer dan internet menghadirkan kesadaran pada umat manusia bahwa proses administrasi dapat dilakukan tanpa kertas dan tanpa melalui kehadiran secara fisik, yang secara signifikan memotong proses birokrasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan layanan administrasi publik. Atas semangat tersebut, dan juga setelah sebelumnya didahului oleh sektor swasta yang bersaing untuk mendapatkan perhatian pasar, sektor publik ikut menerapkan digitalisasi dalam proses birokrasi dan juga administrasi yang melingkupinya. Hal ini ikut terjadi pada tata kelola pemerintahan di Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung yang perlahan mengalami fenomena transformasi digital yang menjadi fokus penelitian kami. Metode Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan wawancara ekstensif pada Kasi Pemerintahan, Staff Keuangan, dan Staff TI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek seperti program pengembangan skill dan juga adopsi aplikasi digital, Kelurahan Sukaluyu telah melakukan dengan sangat baik, namun perlu ditingkatkan lagi aspek pembiayaan, stabilitas politik dan interoperabilitas yang tentu saja tidak hanya menjadi tanggung jawab Kelurahan namun juga Pemkot Bandung.

Kata Kunci: transformasi digital; sektor publik; tata kelola pemerintahan; Kelurahan Sukaluyu

Digital Transformation in Public Governance at Sukaluyu Sub-District Bandung City

Abstract

The birth and the rapid development that follows the rise of personal computer and internet makes human being realize the potential of a process of administration that doesn't involve paper and without physical attendance, ensuring that bureaucracy has been shelved a lot in the process. With that spirit in mind, and after seeing the private sector switching its business from manual-oriented to digital-oriented to get the attention of the market, public sector start implementing digitalization in its bureaucratic process and in administration typically involved with their Governance. This is what is observed by us, seeing how public governance in Sukaluyu Sub-District also transforms, creating a phenomenon that become a focus of our research. The research method is done by extensive interviews with the staff of service, financing and IT, also with the Head of Government Section. The results show that in the factor of skill development programme and the adoption of applications, Sukaluyu has

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

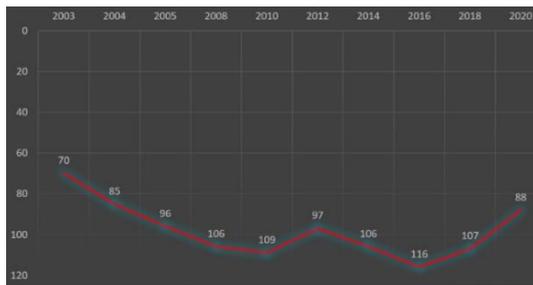
7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

done a good job, but in terms of funding, political stability and interoperability of the apps, Sukaluyu needs to do a bit more, although a case can be made that this is also what the city government needs to look after.

Keywords: digital transformation; public sector; public governance; Sukaluyu Sub-District

A. PENDAHULUAN

Telah lebih dari 20 tahun lamanya, konsep digitalisasi dan pemerintahan elektronik (*e-government*) bergulir di Indonesia, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pemerintah perlahan menciptakan sistem pemerintahan elektronik untuk pelayanan masyarakat sejak dekade 2010-an. Inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat mulai tinggal landas dengan menjamurnya berbagai aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan pembuatan SIM, pembuatan KTP, dan pembayaran pajak daerah. Puncaknya, sebuah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikeluarkan untuk memayungi seluruh peraturan yang telah ada dan juga sistem elektronik yang mungkin masih terpisah-pisah, dalam satu infrastruktur SPBE nasional yang diamanatkan untuk memiliki pusat data nasionalnya sendiri.



Gambar 1. Peringkat e-Gov Indonesia yang terus mengalami peningkatan.
(Sumber : Kominfo.go.id)

Perubahan selama 20 tahun terakhir ini lambat laun mengubah peta tata kelola pemerintahan di Indonesia (Purbo, 2011). Ranking e-Government International Survey yang dikeluarkan Jaringan Administrasi Publik PBB (*United Nations Public Administrations Network*) mengalami peningkatan menjadi ranking ke 88 sejak berada

di posisi terendah di tahun 2010 yaitu ranking ke 109.

Hal ini bisa dibilang cukup membanggakan. Indonesia terlihat telah mengejar ketertinggalannya karena sempat berada pada posisi yang cukup tinggi di tahun 2003, awal dicanangkannya sistem pemerintahan digital. Memang dalam berbagai sisi Indonesia dan e-Gov telah melakukan penerapan yang cepat selama 5 tahun terakhir, Termasuk di tanah pasundan, Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini termasuk yang memiliki prestasi membanggakan dalam pemerintahan digital; dalam penilaian Indeks SPBE Nasional, Provinsi Jabar mendapatkan nilai diatas rata-rata nasional dengan skor 3.37 (rata-rata nasional 2.25).

Tabel 1.

TOP 5 Evaluasi SPBE Nasional (2022)

Provinsi	Skor
DKI Jakarta	3.67
Kalimantan Barat	3.42
Jawa Barat	3.37
Lampung	3.37
Nusa Tenggara Timur	3.35

Sumber : jabarprov.go.id

Bicara tentang Jawa Barat tidak akan *afidhol* tanpa membicarakan Kota Bandung, yang kebetulan dalam Indeks tersebut juga menjadi Kota/Kabupaten di Jawa Barat memiliki nilai evaluasi SPBE tertinggi kedua.

Di Kota Bandung juga beberapa upaya seperti ATCS (CCTV yang dapat diakses oleh warga melalui website), dan juga program Bandung Smart City, dan Bandung Sadayana. Pembahasan mengenai Kota Bandung akan membawa kita kepada Kelurahan Sukaluyu, yang akan penulis bahas lebih dalam nanti. Untuk kepentingan argumentasi kita, mari kita anggap bahwa perubahan ini bersifat

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

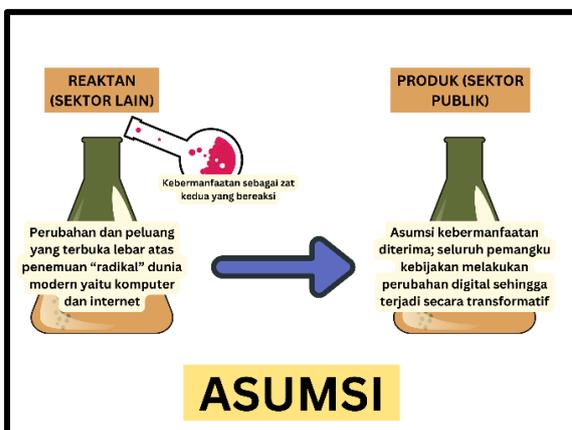
7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

"transformatif", yang membawa kita pada bahasan mengenai transformasi digital.

Transformasi digital itu sendiri, yang menurut Shaugnessy (dalam Jonathan, 2020) merupakan "sebuah ikhtiar bersama yang dilakukan oleh suatu organisasi secara menyeluruh, dimana perubahan tersebut melibatkan beberapa hal teknis dan kultural yang berubah." Sebuah proses transformasi muncul sebagai konsekuensi dari potensi teknologi digital yang telah ada sebelumnya. Dapat sedikit kita rangkum, bahwa proses transformasi ini adalah transformasi digital (Moser-Plautz & Schmidhuber, 2023).

Dari berbagai definisi transformasi digital, termasuk dalam sektor publik yang telah dijelaskan sebelumnya oleh berbagai peneliti, penulis dapat mengkaji secercah pemahaman bahwa transformasi digital adalah seperti proses reaksi kimia; dimana pereaksinya atau zat yang bereaksi adalah zat pertama, yaitu dari perubahan radikal dunia yang menjadi lebih modern (Stewart-Weeks & Cooper, 2019).

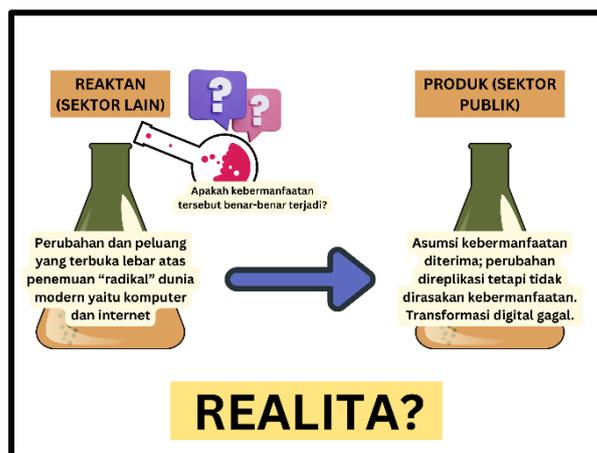
Disaat yang sama muncul kemudahan terhadap umat manusia secara digital, yang menjadi zat kedua. Zat pertama dan zat kedua ini bereaksi sebagai pereaktan, dimana reaksi kimia yang muncul adalah replikasi perubahan digital pada sektor publik dikarenakan terdapat sebuah asumsi atau kepercayaan akan muncul manfaat yang besar dari bergantinya cara melakukan sesuatu menjadi digital; sehingga muncul sebuah upaya, yang karena dilakukan bersama-sama menjadi *transformatif*.



Gambar 2.

Asumsi dalam Transformasi Digital di Sektor Lain vs Sektor Publik

Pertanyaan yang muncul : seberapa bermanfaat dan berhasil sebenarnya transformasi digital yang telah muncul di sektor publik, terutama di negara Indonesia ini, sebagai produk reaksi kimia tersebut? Karena kita mengetahui apabila zat kedua (kebermanfaatan yang terlihat di berbagai sektor) tersebut tidak ada, atau bahkan atom nya tidak setimbang satu sama lain, maka reaksi kimia tidak akan terjadi atau tidak sempurna.



Gambar 3.

Realita dalam Transformasi Digital di Sektor Lain vs Sektor Publik

Hasil studipun mendukung kekhawatiran ini : rata-rata korporasi di dunia berdasarkan hasil publikasi ilmiah yang mengalami kegagalan dalam transformasi digital adalah sebesar 87,5 persen (Wade & Shan, 2020). Mengutip langsung apa yang dituliskan Wade dan Shan, hanya 1 dari 8 transformasi digital yang ada di dunia berhasil. Dalam artian, sangat sedikit korporasi di dunia yang transformasi digitalnya menjadikan pengalaman konsumen lebih menyenangkan, meningkatkan keuntungan, mencapai nilai investasi yang diharapkan, dan masih banyak lagi (Wade & Shan, 2020).

Apa hal ini juga terjadi pada sektor publik, dimana keuntungan bisa dianggap sebagai kebermanfaatan, dan kepuasan masyarakat sebagai konsumen tanpa pemerintah berharap imbal balik, menjadi nilai tukar utama? Faktor dan model apa saja yang sebenarnya berkontribusi dalam keberhasilan transformasi digital di sektor publik? Kekosongan Kajian dalam hal tersebut, terutama di objek penelitian

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

penulis yaitu Kelurahan Sukaluyu menjadi alasan utama untuk menciptakan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian dan Konteks Hukum di Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian dimana penulis melakukan observasi adalah di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Kantor Kelurahan Sukaluyu Jalan Rereng Wulung No. 16, Kota Bandung (Pengelolaan Arsip Pada Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Berbasis Website et al., 2023). Kantor kelurahan yang terletak tidak jauh dari jantung Kota di Gedung Sate ini telah mengikuti arahan pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan digital. Pengamatan dilakukan pada 24 September 2022 lalu, disusul dengan pengamatan lanjutan pada tahun ini.

Tata Kelola Pemerintahan Digital di Kelurahan Sukaluyu

Didirikannya Kelurahan Sukaluyu sebagai wilayah administratif yang berada dibawah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, pasti tidak lepas dari fungsi pelimpahan wewenang yang diberikan Walikota kepada Camat yang kemudian melimpahkan sebagian tugasnya kepada Lurah.

Dalam hal administratif, di zaman dahulu proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran pasti melalui suatu tahapan "merangkak" yang awalnya bermula dari surat pengantar RT, RW, sampai ke Kelurahan, dan akhirnya ke Kecamatan.

Namun dikarenakan proses Administrasi Kependudukan telah dihapuskan dalam pelayanan kelurahan (wawancara dengan Ibu Widiyantie Saleh, Kasi Pemerintahan Kelurahan Sukaluyu 29 September 2022), maka sebagian besar pelayanan adalah berbentuk Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dll.

Dari hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan pada penelitian ini, setidaknya terdapat kurang lebih 11 mekanisme administrasi dan birokrasi di Kelurahan Sukaluyu yang telah menggunakan pemerintahan digital. Mekanisme ini jika

dibedah lebih dalam, semuanya menggunakan cara digital yaitu melalui situs internet, atau aplikasi yang bisa diunduh secara mandiri di Google Play Store. Mekanisme administrasi tersebut, diantaranya :

Tabel 1 .
Mekanisme Administrasi Digital di Lingkungan Kelurahan Sukaluyu

No	Mekanisme digital	Fungsi	Jenis Administrasi
1	SIMPEG-ADM	Mengisi data diri pegawai, dibuat Kemendagri	Administrasi Kepegawaian
2	SIP	Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kewilayahan	Administrasi Kewilayahan / Kepegawaian
3	SIPAKU	Melaporkan perkembangan pengajuan layanan adminduk seperti KTP, KK, Surat Keterangan dll	Administrasi Kepegawaian
4	SISLINMAS	Mekanisme pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh LINMAS	Administrasi Kepegawaian
5	LAPOR	Mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan	Administrasi Pelaporan
6	SIMDA	Mekanisme pelaporan, perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan	Administrasi Keuangan
7	EPDESKEL	Mekanisme melaporkan profil wilayah, profil kelurahan, luas daerah dan jumlah penduduk	Administrasi Wilayah

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

8	MANGBAG JA	Mekanisme untuk pegawai secara individu melaporkan dan mencatatkan performa kerjanya dalam aplikasi tersebut	Administrasi Kepegawaian
9	e-BUPOT	Mekanisme pembayaran pajak yang ikut dikeluarkan oleh kelurahan pada negara dalam beberapa jenis pengajuan anggaran / kegiatan	Administrasi Keuangan
10	e-SATRIA	Mekanisme pembayaran pajak daerah.	Administrasi Keuangan
11	SIPD	Mekanisme penginputan anggaran	Administrasi Keuangan

Ke sebelas mekanisme digital tersebut membentuk suatu ekosistem tata kelola digital yang telah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai situasi pelayanan dan birokrasi, di lingkungan Kelurahan Sukaluyu.

Faktor-faktor penentu implementasi transformasi digital yang efektif dari Jonathan (2020)

Sebuah studi yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Universitas Stockholm, Gideon Meckonen Jonathan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat berkontribusi bagi kesuksesan implementasi transformasi digital yang dilaksanakan sektor publik. (Jonathan, 2020) mengemukakan bahwa transformasi digital yang terjadi pada sektor publik dapat dilihat sebagai pengaplikasian dari teknologi informasi untuk menjadi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dari institusi pemerintahan.

Hasil studi mendalam terhadap jurnal yang dipublikasikan oleh Altameem dkk, (2006) dan Gil-Garcia serta Pardo (2005), mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya tiga tantangan yang

dapat mempengaruhi proses transformasi digital di sektor pemerintahan: tantangan manajerial dan organisasi, tantangan teknologi informasi, dan tantangan lingkungan. (Jonathan, 2020). Tantangan tersebut dapat dilihat dalam grafik dibawah :

Tantangan teknologi dan informasi terdiri atas : *pertama*, keamanan data (*data security*), *kedua*, arsitektur teknologi informasi (*IT-architecture*), *ketiga*, kemampuan satu sistem atau aplikasi pemerintah untuk saling bertukar informasi satu dan lainnya (*interoperability*), *keempat*, kecepatan untuk bertindak berdasarkan data (*data-driven agility*).



Gambar 4. Faktor-Faktor yang menentukan kesuksesan pada transformasi digital di sektor publik

Tantangan manajerial dan organisasi terdiri atas : *pertama*, manajemen perubahan (*change management*) yang diperlukan untuk mengelola dinamika organisasi ketika terjadi transisi dari proses manual ke digital. *Kedua*, budaya organisasi (*organizational culture*). *Ketiga*, Keselarasan Teknologi Informasi dengan Proses Bisnis suatu Institusi Pemerintahan (*Business-IT Alignment*), *Keempat*, Pemimpin yang turun ke bawah (*Leadership Engagement*), dan *Kelima*, Program Pengembangan Skill bagi PNS (*Skill Development Programme*)

Terakhir, ada tantangan yang berasal dari lingkungan sekitar. Tantangan tersebut terdiri atas : *Pertama*, Pembiayaan (*funding*). *Kedua*, stabilitas politik (*political stability*). *Ketiga*, Partisipasi masyarakat (*citizen participation*). *Keempat*, kerangka kerja kebijakan yang jelas

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

(Regulatory frameworks). *Kelima*, kualitas dari layanan telekomunikasi seperti jaringan internet atau telepon genggam (*Telecommunications service quality*). Dari teori ini, sesuai dengan perlakuan ilmiah yang telah dilakukan (Jonathan, 2020) dalam Publikasi Ilmiahnya, kami menyesuaikan pula beberapa faktor yang menurut kami dapat diterapkan dalam faktor faktor kesuksesan suatu transformasi digital di tingkat kelurahan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

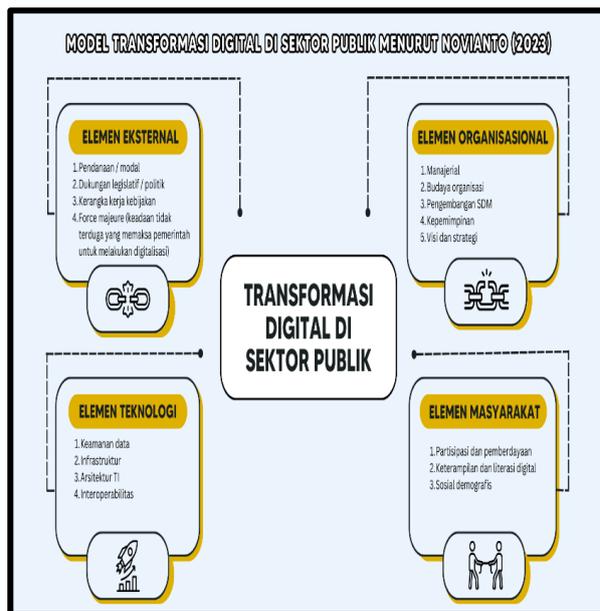
1. Faktor Organisasi dan Manajerial
 - a. Budaya Organisasi, Budaya Organisasi Mengarah pada peningkatan akuntabilitas setelah pelaporan kinerja harus selalu melalui MANGBAGJA.
 - b. Keselarasan antara TI dan Bisnis. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Sukaluyu, yaitu pelayanan identik dengan kecepatan dan ketepatan yang dapat diidentifikasi sebagai kebutuhan konsumen. Namun, harus disadari bahwa aplikasi yang mengakomodasi hal ini di tingkat Kelurahan yang dihadirkan Pemkot (SIPAKU) terkesan kurang efektif dalam pengimplementasiannya.
 - c. Pemimpin yang turun kebawah. Menurut wawancara dengan Ibu Widiyanti Saleh, Lurah Kelurahan Sukaluyu Ibu Ami selalu menekankan kepada pegawainya agar menggunakan aplikasi digital untuk melaporkan setiap kegiatan, agar performa Kelurahan Sukaluyu dapat selalu terdata oleh pemerintah kota, sehingga kerja keras para ASN di Kelurahan Sukaluyu juga terlihat.
 - d. Program pengembangan skill. Untuk menunjang kemampuan para ASN terhadap penggunaan aplikasi atau situs digital, maka dilakukan bimtek yang diadakan oleh Kecamatan atau Pemerintah Kota. Jika dirasa perlu, maka Kelurahan Sukaluyu dapat mengadakan Bimbingan Teknisnya sendiri, dan telah melakukannya di masa lalu.
2. Faktor Teknologi Informasi
 - a. Keamanan Data. Belum dianggap relevan dengan identifikasi tingkat kelurahan.
 - b. Arsitektur TI. Belum dianggap relevan dengan identifikasi tingkat kelurahan.
 - c. Interoperabilitas. Dalam aplikasi administrasi keuangan, ada sedikit kerumitan dalam melakukan pengajuan anggaran dan kegiatan yang harus dilakukan melalui dua aplikasi, dimana satu aplikasi (SIPD), harus masuk dengan 4 akun yang berbeda, dan tidak ada interoperabilitas antara data anggaran yang satu dengan yang lainnya. Ini tentu saja menjadi catatan untuk pihak KEMENDAGRI dan PEMKOT yang menyediakan aplikasi tersebut.
 - d. Cekat bertindak berdasarkan data. Belum dianggap relevan dengan identifikasi tingkat kelurahan
3. Faktor Lingkungan Sekitar
 - a. Pembiayaan. Kebutuhan untuk pengadaan perangkat PC di bagian pelayanan, menjadi identifikasi yang kami sadari setelah melakukan wawancara lebih dalam. Pengadaan pertama kali diajukan pada 2017 dan belum mendapat persetujuan, karena prioritas lain. Pihak Pemerintah Kota harus ikut membantu untuk menelaah lebih lanjut mengenai hal ini.
 - b. Stabilitas Politik. Pergantian pemerintahan membawa pergantian sistem dan bahkan aplikasi. Pada era Ridwan Kamil, aplikasi administrasi keuangan menggunakan SIRA, sebelum akhirnya diganti menjadi SIMDA.
 - c. Partisipasi Masyarakat. Untuk tingkat kelurahan, dalam adminduk menjadi catatan juga. Seperti disinggung sebelumnya, aplikasi seperti SIPAKU kurang digunakan karena dirasa tidak efektif (lebih baik langsung bertanya ke Kelurahan saja atau melalui whatsapp).
 - d. Kerangka kebijakan yang jelas. Peraturan Walikota telah memiliki kerangka kebijakan yang jelas seperti perwalkot SPBE, namun untuk tingkat Kelurahan belum ada.

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- e. Kualitas Jaringan. Kualitas Jaringan sudah ditunjang dengan wifi yang disediakan diskominfo, namun tidak terlalu menjangkau. Kelurahan melakukan pengadaan internet sendiri melalui Indihome, yang harus dievaluasi juga karena kecepatannya belum sempat ditambah.



Gambar 5. Model Transformasi Digital dari Novianto (2023)

Dari model tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya kesimpulan yang didapatkan adalah hampir sama (Novianto, 2023, Jonathan, 2020). Sehingga untuk identifikasi faktor berdasarkan model transformasi digital, penulis merasa tidak diperlukan lagi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sukaluyu melakukan pekerjaan yang sangat baik, dalam mengadopsi aplikasi digital dalam administrasi keuangan dan kepegawaian. Namun, pemerintah kota dan pemerintah pusat mesti memperhatikan aspek interoperabilitas, stabilitas politik dan juga evaluasi aplikasi yang dilihat dari akun SIPD yang harus berganti-ganti, fenomena ganti pemerintah ganti aplikasi dan aplikasi SIPAKU yang untuk tingkat Kelurahan kurang diminati masyarakat. Ini harus menjadi catatan penting kedepannya.

REFERENSI

- Jonathan, G. M. (2020). Digital transformation in the public sector: Identifying critical success factors. *Lecture Notes in Business Information Processing*, 381 LNBIP, 223–235. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44322-1_17
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 - 423. <http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>
- Moser-Plautz, B., & Schmidhuber, L. (2023). Digital government transformation as an organizational response to the COVID-19 pandemic. *Government Information Quarterly*, 40(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101815>
- Mulyadi, D., Maulana, R. (2022). Policy Evaluation of Village Head Election in Bandung Regency. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science (ICAS 2021)*. DOI 10.4108/eai.15-9-2021.2315255.
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103. <http://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.019>
- Novianto, N. (2023). Systematic Literature Review: Models of digital transformation in the public sector. *Policy & Governance Review*, 7(2), 170–194. <https://doi.org/10.30589/pgr>
- Pengelolaan Arsip Pada Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Berbasis Website, S., Miftahuddin, Y., Premitasari, M., Al Hakim, G., Afriazi, A. M., Razi Saefunazar, M., Nurul Hadi, N. H., & Fawwaz, A. (2023). Website-Based Archive Management System In Sukaluyu Village, Cibeunying Kaler District. *Pengabmas Nusantara*, 5(2), 140–149. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.309>

konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 5(1), 17-27.
<https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.665>.
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40.
<https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Purbo, O. W. (2011). *Sejarah Internet Indonesia: e-government*.
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182.
<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>.
- Stewart-Weeks, M., & Cooper, S. (2019). *Are we there yet?: the digital transformation of government and the public sector in Australia* (S. Gallagher, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Longueville Media.
- Syawali, A.Z.S., Harahap, A.S., Pradesa, H.A., Andikaputra, F.A.T. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi BJB DIGI Mobile Banking dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer*, 4 (1), 624 - 633.
<https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1205>
- Taufik, N.I., Wijayanti, R. (2021). Penerapan E-Office di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 424-428.
<http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3754>
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135.
<https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Wade, M., & Shan, J. (2020). Covid-19 has accelerated digital transformation, but may have made it harder not easier. *MIS Quarterly Executive*, 19(3), 213-220.
<https://doi.org/10.17705/2msqe.00034>